

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik berkepanjangan yang kompleks di dunia. Ketegangan kedua negara ini bermula ketika tanah Palestina menjadi sengketa antara bangsa Yahudi dan bangsa Arab pada tahun 1917. Banyak faktor yang menyebabkan konflik ini berlangsung lama, salah satunya adalah Deklarasi Balfour. Pada tanggal 2 November 1917, Deklarasi Balfour dimandatkan Inggris yang didukung negara-negara barat bertujuan untuk mendirikan “rumah” bagi kaum Yahudi di sebagian wilayah Palestina. Deklarasi Balfour dipromosikan oleh Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, yaitu Arthur Balfour bersama dengan Perdana Menteri Inggris Lloyd George untuk mencari dukungan dari organisasi zionis untuk bergabung dalam sekutu Inggris dalam memenangkan perang (Bus dalam Lenczowski, 2017).

Menurut (Bus dalam Rogan; 2017), Deklarasi Balfour merupakan komitmen Inggris untuk membentuk tanah air nasional bagi bangsa Yahudi. Akibat dari Deklarasi Balfour telah membuat bangsa Yahudi memasuki wilayah Palestina secara besar-besaran. Sekitar 100.000 bangsa Yahudi bermigrasi ke wilayah Palestina pada saat deklarasi dipromosikan. Kondisi ini semakin meningkatkan ketegangan antara bangsa Arab yang telah mendiami wilayah Palestina dan bangsa Yahudi yang berpindah ke Palestina. Kehadiran bangsa Yahudi di wilayah Palestina telah menciptakan ketegangan antar bangsa Arab dan bangsa Yahudi sekaligus dapat menjadi ancaman besar bagi negara-negara Arab di masa depan.

Konflik bangsa Arab dan bangsa Yahudi semakin memanas pada tahun 1948, bangsa Yahudi mendeklarasikan kemerdekaannya dan membentuk negara Israel di tanah Palestina. Terbentuknya negara Israel telah membuka babak baru peperangan di Timur Tengah. Perang yang berlangsung pasca kemerdekaan Israel telah menciptakan ketegangan di Palestina hingga saat ini. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meredakan ketegangan antara Palestina dan Israel, ketegangan tersebut belum menemukan titik terang sehingga menciptakan ketidakstabilan kawasan hingga saat ini.

Eskalasi konflik Israel-Palestina meningkat signifikan pada tanggal 7 Oktober 2023. Kelompok militan Palestina Hamas melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober, dengan ratusan pria bersenjata menyusup ke komunitas dekat Jalur Gaza (Knell, 2023). Menurut Otoritas Israel, lebih dari 1.200 orang yang telah terbunuh akibat serangan dari kelompok Hamas dan 133 orang masih disandera sejak 7 oktober hingga 15 desember. Sehari setelah serangan kelompok Hamas, Israel membalas serangan tersebut dengan mengirimkan serangan udara ke wilayah Gaza tanpa henti. Lebih dari 18.700 warga Palestina, termasuk 7.800 anak-anak yang tewas dari serangan udara Israel mulai dari 7 oktober hingga 12 desember 2023 menurut Otoritas Gaza (Knell, 2023).

Wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel masih terjerumus dalam kondisi yang rumit dan belum terselesaikan, ditandai dengan kekerasan dan ketegangan politik yang semakin membara antara warga Israel dan Palestina. Meskipun, konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun masih belum menemukan titik damai. Berbagai rencana perdamaian telah diajukan, tetapi semuanya gagal menghasilkan resolusi yang langgeng. Kerumitan negosiasi diplomatik kontemporer, menggarisbawahi tantangan berat yang melekat dalam upaya

mencari resolusi yang komprehensif dan langgeng untuk konflik yang berlarut-larut dan mengakar kuat ini.

Gerakan *Boycott, Divestment, & Sanction* (BDS) merupakan inisiatif masyarakat sipil global yang dipimpin Palestina yang bertujuan untuk memajukan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi penduduk Palestina. Berakar pada seruan masyarakat sipil Palestina pada tahun 2005 untuk memperjuangkan hak-hak mereka tanpa kekerasan untuk melawan opresi dari Israel. Pada bulan Juli 2005, 173 organisasi dalam masyarakat sipil Palestina—termasuk serikat pekerja, kelompok perempuan, organisasi nonpemerintah (LSM), partai politik, dan organisasi akar rumput lainnya dari semua jenis—secara resmi mengeluarkan seruan untuk BDS yang menargetkan Israel sampai memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional (Barghouti, 2011)

Gerakan AAM memainkan perang penting dalam menghancurkan rezim Apartheid Afrika Selatan setelah puluhan tahun terjadi. Keberhasilan AAM telah menginspirasi gerakan BDS untuk memperoleh momentum global dalam menyuarakan hak-hak masyarakat Palestina. Seperti yang dikemukakan oleh Penerima Hadiah Nobel Perdamaian yang terhormat, Uskup Agung Desmond Tutu dalam mengomentari solidaritas internasional dan kesamaan antara AAM dan BDS, “akhir apartheid merupakan salah satu pencapaian puncak abad lalu, tetapi kita tidak akan berhasil tanpa bantuan tekanan internasional...gerakan serupa telah terbentuk, kali ini bertujuan untuk mengakhiri pendudukan Israel”. Seruan BDS mencakup boikot akademis, budaya, dan konsumen terhadap pemerintah, lembaga, dan perusahaan Israel, dan juga meminta organisasi dan pemerintah internasional untuk memberikan sanksi dan divestasi dari Israel dengan cara yang sama yang diterapkan secara luas pada rezim Apartheid Afrika Selatan (Barghouti, 2011).

Berbeda dengan AAM pada beberapa dekade yang lalu, gerakan BDS saat ini telah memanfaatkan instrumen kontemporer seperti sosial media dan jaringan global. Hal ini membuat langkah gerakan BDS berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kesadaran global untuk menentang sistem penindasan yang mengakar dibandingkan metode yang dilakukan AAM. Gerakan BDS berfokus pada strategi multifaset meliputi boikot, divestasi, dan sanksi dalam memberikan tekanan pada Israel agar selaras dengan hukum internasional. Dalam beberapa tindakan dari gerakan BDS, mereka mengadopsi gerakan dari AAM untuk membangun dukungan berbasis luas, baik secara lokal maupun internasional. Tetapi gerakan BDS dapat menyempurnakan strateginya untuk membangun respons global yang lebih terpadu sekaligus tetap adaptif terhadap perubahan zaman.

Gerakan BDS memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian Israel, khususnya melalui kampanye boikot ekonomi dan tekanan terhadap perusahaan internasional yang beroperasi di wilayah pendudukan atau terlibat dalam pelanggaran hukum internasional oleh Israel. Gerakan ini menargetkan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan militer atau pemerintah Israel. Kampanye yang dilakukan oleh BDS telah memengaruhi beberapa perusahaan besar seperti Veolia dan Orange untuk menarik diri dari Israel, sementara banyak investor lainnya memutuskan hubungan dengan perusahaan yang berafiliasi dengan Israel. Menurut PBB, Bank Dunia, dan para ahli lainnya, dampak ekonomi BDS terhadap Israel mulai terasa dan diprediksi akan terus berkembang seiring semakin luasnya gerakan ini (BBC News, 2024).

Gerakan BDS secara spesifik menargetkan sektor-sektor ekonomi vital Israel seperti perdagangan internasional, investasi, dan hubungan bisnis. Ekonomi Israel yang sangat bergantung pada perdagangan dan investasi global menjadikannya rentan

terhadap tekanan ekonomi internasional. BDS menyerukan boikot produk-produk Israel yang secara langsung mendukung pelanggaran hak asasi manusia, seperti eksportir produk segar Mehadrin dan Hadiklaim yang terlibat dalam perampasan tanah Palestina.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mendalam tentang pengaruh dari Gerakan *Boycott, Divestment, & Sanction* (BDS) terhadap Israel dalam konflik Israel-Palestina. Penelitian terkait Gerakan BDS telah dilakukan dalam beberapa penelitian sebelumnya dengan menggunakan teori *Transnational Advocacy Network* (TAN). Penelitian yang membahas gerakan BDS sebelumnya berfokus pada permasalahan yang dihadapi perempuan Palestina pada tahun 2010 (Sugianto, 2023). Penelitian ini menggunakan konsep yang sama yakni teori *Transnational Advocacy Network* (TAN) untuk menganalisis advokasi yang dilakukan oleh gerakan BDS, serta menggunakan konsep Gerakan Sosial Baru. Namun, pada penelitian ini Gerakan BDS difokuskan pada pengaruh gerakan BDS terhadap Israel di bidang politik dan ekonomi.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis membatasi permasalahan pada rentang tahun 2005-2023. Maka dari itu, untuk mempermudah, berikut rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis dalam penelitian ini:

1. Bagaimana strategi BDS dalam memobilisasi visinya terhadap konflik Israel-Palestina?
2. Bagaimana dampak Gerakan BDS terhadap politik dan ekonomi Israel?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui strategi Gerakan *Boycott,*

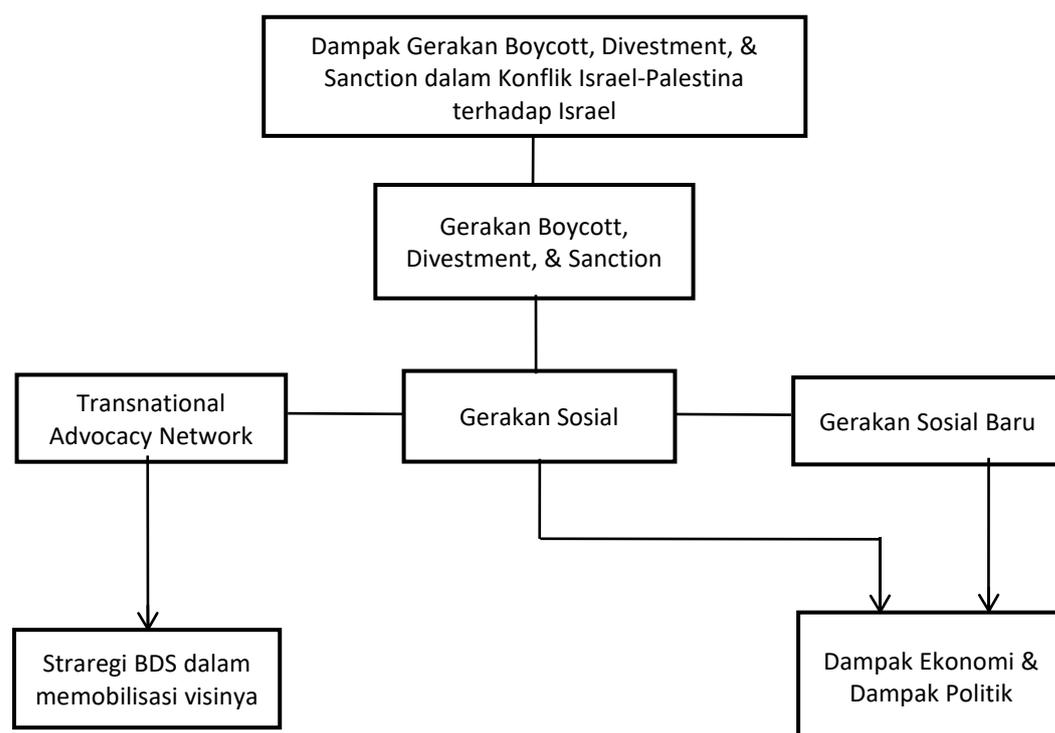
Divestment & Sanction dalam memobilisasi visinya dalam konflik Israel-Palestina. 2) Untuk mengetahui dampak Gerakan *Boycott, Divestment & Sanction* terhadap konflik Israel-Palestina.

Adapun secara spesifik, manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap literatur akademis dalam bidang studi hubungan internasional tentang dampak Gerakan *Boycott, Divestment & Sanction*, dengan fokus pada konflik Israel-Palestina.
2. Hasil penelitian dapat memberikan pemahaman kepada penulis maupun pembaca khususnya mahasiswa/i prodi Ilmu Hubungan Internasional terkait kajian gerakan sosial dalam hubungan internasional.
3. Penelitian dapat mengidentifikasi dampak dari Gerakan *Boycott, Divestment & Sanction* terhadap Israel dalam konflik Israel-Palestina.

1.4 Kerangka Konseptual

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Sumber: Penulis

Dalam menjawab rumusan masalah penelitian, penulis akan menggunakan Konsep Jaringan Advokasi Transnasional untuk menganalisis bagaimana strategi Gerakan *Boycott, Divestment, & Sanction* dalam memobilisasi visi mereka dalam konflik Palestina-Israel. Penulis akan menggunakan konsep Gerakan Sosial Baru dalam menganalisis katalisasi pembentukan Gerakan *Boycott, Divestment, & Sanction*. Kedua konsep ini akan digunakan penulis untuk menjawab bagaimana Gerakan *Boycott, Divestment, & Sanction* dapat memberikan dampak terhadap Israel di bidang politik & ekonomi.

1. *Transnational Advocacy Network (TAN)*

Transnational Advocacy Network (TAN) adalah jaringan kelompok individu dan organisasi terstruktur yang beroperasi secara lintas batas negara, disatukan oleh nilai, prinsip, atau tujuan bersama. Jaringan ini terlibat dalam tindakan kolektif yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan dan norma internasional, yang sering kali berfokus pada isu-isu seperti hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial (Keck dan Sikkink, 1998). Mereka memanfaatkan informasi, sumber daya, dan komunikasi strategis untuk memobilisasi dukungan, meningkatkan kesadaran, dan mengadvokasi perubahan, sehingga memperkuat suara kelompok yang terpinggirkan dan membentuk wacana global.

Para aktor yang terlibat dalam teori TAN ini terikat oleh nilai-nilai bersama. Kemampuan aktor-aktor, terutama yang non-tradisional, secara strategis dapat memobilisasi informasi untuk menciptakan isu-isu baru atau menekan organisasi dan/atau pemerintah yang lebih kuat menjadi keunikan tersendiri dari TAN. Mereka bertujuan mengubah perilaku negara dan organisasi internasional dengan melakukan

“*Framing Issue*” untuk menarik perhatian masyarakat secara luas agar dapat memberikan tekanan kepada pihak yang menjadi target advokasi (Keck dan Sikkink, 1998). Aktor-aktor dalam jaringan ini membawa ide, norma, dan wacana baru ke dalam perdebatan kebijakan sebagai sumber informasi untuk memperkuat argumen mereka.

Jaringan advokasi telah ada sejak lama, kampanye penghapusan perbudakan pada abad ke-19 menjadi fenomena konkrit dari jaringan advokasi. Namun ukuran, jumlah, profesionalisme jaringan advokasi, dan kompleksitas ilmu hubungan internasional berkembang semakin pesat. Keck dan Sikkink mengutip (Schneider dalam Hecllo, 2016), jaringan isu yang kompleks saat ini merupakan perkembangan dari pola yang sudah ada sebelumnya.

Jaringan advokasi transnasional menggunakan cara yang sama seperti gerakan sosial atau kelompok politik lainnya dalam mencari pengaruh melalui cara-cara non-tradisional. Dikarenakan mereka tidak memiliki kekuasaan secara tradisional, mereka harus menggunakan cara-cara non-tradisional seperti kekuatan informasi, ide, dan strategi untuk mengubah informasi dan konteks nilai di mana negara membuat kebijakan (Keck dan Sikkink, 1998).

Keck dan Sikkink kemudian memetakan strategi yang digunakan dalam melakukan persuasi, sosialisasi, dan memberikan tekanan ke dalam empat klasifikasi yaitu: *Information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*.

Information politics merujuk pada kemampuan jaringan dalam memobilisasi informasi yang dapat digunakan secara politis dengan kredibel dan cepat ke tempat yang berpotensi memberikan dampak besar. Informasi dalam taktik ini berasal dari anggota jaringan itu sendiri, biasanya berasal dari testimoni ataupun mencakup fakta

dari anggota yang terdampak dalam suatu isu. Dengan demikian, anggota dari jaringan ini melakukan pertukaran informasi untuk mencapai pemahaman bersama. Dalam taktik ini, media menjadi instrumen penting dalam jaringan transnasional untuk menyebarkan informasi secara cepat dan menjangkau khalayak luas. *Information politics* ini digunakan guna memberikan pemahaman dan mendapatkan dukungan dari publik (Keck dan Sikkink, 1998).

Symbolic politics berkaitan dengan TAN dalam menggunakan *framing issue* dalam kerangka kerjanya. Para aktivis melakukan *framing* dengan memberikan penjelasan dan mengidentifikasi peristiwa simbolis yang kuat, yang kemudian menjadi katalisator bagi perkembangan jaringan. Interpretasi simbol merupakan bagian dari proses persuasi untuk menciptakan kesadaran dan memperluas konstituensi. *Framing* ini mencakup penggunaan simbol, narasi, ataupun aksi tertentu, dengan tujuan untuk mengangkat isu-isu untuk diadvokasikan kepada audience yang luas (Keck dan Sikkink, 1998).

Selanjutnya *leverage politics* yang merujuk pada pencarian pengaruh dengan menggandeng aktor yang lebih kuat dalam menekan aktor target. Aktivitas dalam TAN peduli dengan efektivitas politik, efektivitas ini acap kali melibatkan beberapa perubahan kebijakan oleh aktor target yang mungkin adalah pemerintah. Keck dan Sikkink menjelaskan dalam taktik ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 1) *Moral Leverage* dan 2) *Material Leverage* (Keck dan Sikkink, 1998).

Moral leverage menggunakan "*mobilization of shame*" untuk mengekspos perilaku terhadap pengawasan internasional, memengaruhi negara-negara yang menghargai prestise global, seperti yang terlihat dalam kampanye makanan bayi di mana bahkan eksportir besar mendukung kode yang membatasi. *Material Leverage* sering kali melibatkan keterkaitan isu dengan sumber daya seperti uang, perdagangan,

atau prestise untuk membuatnya dapat dinegosiasikan, seperti yang terlihat ketika praktik hak asasi manusia dikaitkan dengan bantuan atau hubungan diplomatik. LSM dan aktivis mengangkat isu penting melalui informasi dan politik simbolik, yang memungkinkan aktor berpengaruh untuk menghubungkan kerja sama dengan insentif yang berharga, seperti pinjaman atau manfaat perdagangan (Keck dan Sikkink, 1998).

Terakhir *accountability politics* berkaitan dengan akuntabilitas target advokasi. Jaringan mendedikasikan energinya untuk meyakinkan pemerintah atau aktor lain untuk mengubah posisi mereka terhadap suatu isu. Walaupun hal ini sering kali dianggap sebagai perubahan yang tidak penting dan mencoba mengalihkan perhatian jaringan dan publik, namun aktivis jaringan mencoba menjadikan pernyataan tersebut sebagai peluang untuk politik akuntabilitas. Hal ini memalukan bagi pemerintah atau aktor yang terlibat, yang mungkin mencoba menyelamatkan muka dengan menutup jarak (Keck dan Sikkink, 1998).

Dalam menilai pengaruh jaringan advokasi, Keck dan Sikkink mengemukakan indikator pencapaian di beberapa tingkatan yang berbeda. Mereka mengidentifikasi jenis pengaruh jaringan advokasi transnasional menjadi lima, meliputi: (1) penciptaan isu dan penetapan agenda; (2) pengaruh pada posisi organisasi internasional dan diskursif negara; (3) pengaruh pada prosedur kelembagaan (4) pengaruh pada perubahan kebijakan dalam "aktor target" yang dapat berupa negara, organisasi internasional seperti Bank Dunia, atau aktor swasta seperti Nestle Corporation; dan (5) pengaruh terhadap perilaku negara. Jaringan membantu menarik perhatian pada isu-isu yang sebelumnya diabaikan ke ranah publik melalui provokasi media, debat, hingga pertemuan yang membahas isu tersebut (Keck dan Sikkink, 1998).

Melalui kerangka konseptual dari TAN, Strategi BDS dalam memobilisasi visinya terhadap konflik Israel-Palestina dapat dijelaskan melalui formula yang

dikemukakan oleh Keck dan Sikkink. Klasifikasi strategi yang telah dikemukakan akan dijadikan sebagai alat analisis dalam menjawab bagaimana strategi BDS dalam memobilisasi visinya. Selain itu, terdapat indikator dalam menilai pengaruh jaringan advokasi yang akan dijadikan sebagai bahan evaluasi bagaimana perkembangan Gerakan BDS hingga saat ini.

2. Gerakan Sosial

Gerakan sosial merupakan konsep yang menyoroti tindakan kolektif yang muncul bersamaan transformasi struktural selama abad ke-18 dan ke-19 yaitu, demokratisasi, nasionalisasi, dan perkembangan kapitalisme modern. Asal usul historis gerakan sosial tertanam dalam narasi yang dikembangkan dari waktu ke waktu. Secara historis, gerakan sosial berkembang melalui perubahan sosial, inovasi politik, dan transformasi budaya. Charles Tilly dalam bukunya *“Social Movements, 1768-2004”*, menjelaskan bahwa gerakan sosial muncul sebagai bentuk politik kontestatif yang terstruktur (Tilly, 2004).

Gerakan sosial tidak muncul secara spontan, tetapi lahir dari transformasi historis yang mendalam dalam cara masyarakat membuat klaim kepada pihak yang berkuasa. Gerakan sosial berkembang di era demokratisasi untuk memengaruhi kebijakan domestik yang merugikan masyarakat luas. Perubahan itu yang memicu masyarakat untuk melakukan pertentangan melalui tindakan secara kolektif. Tilly menyoroti bahwa gerakan sosial menjadi alat untuk menuntut perubahan politik yang lebih inklusif. Hal ini dapat dilihat dari analisis Tilly dalam fenomena abad ke-19, di mana gerakan buruh menentang kebijakan di masa itu melalui aksi kolektif (Tilly, 2004).

Teori gerakan sosial oleh Tilly menyoroti perkembangan aksi kolektif dari masa ke masa. Suara individu dan kelompok yang awalnya terisolasi, kemudian dapat

diperjuangkan. Dalam pandangannya, gerakan sosial berkembang melalui hasil dari dan pendekatan historis yang mendalam dan kombinasi elemen-elemen yang terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat. Elemen-elemen ini meliputi kampanye klaim kolektif, repertoar, dan representasi publik WUNC (*Worthiness, Unity, Numbers, Commitment*) (Tilly, 2004).

Tilly mengidentifikasi klaim kolektif sebagai upaya terorganisir dan berkelanjutan dari suatu kelompok tertentu untuk menyampaikan tuntutan kepada pihak yang memiliki kekuasaan. Klaim ini ditujukan sebagai instrumen untuk memengaruhi kebijakan atau praktik politik yang akan bertentangan dengan pihak lain. Klaim kolektif ini tidak dilakukan secara individual, tetapi melibatkan serangkaian aktivitas yang saling terkait dalam mencapai tujuan pergerakannya. Kampanye sebagai alat klaim kolektif ini dapat mempertahankan momentum dari gerakan sosial (Tilly, 2004).

Repertoar aksi merujuk pada bentuk-bentuk tindakan kolektif yang digunakan untuk menyampaikan klaim kolektif. Repertoar ini berkembang secara signifikan di Eropa Barat, di mana bentuk awal protes masyarakat sering kali bersifat langsung, seperti kerusuhan terhadap pelanggar norma. Namun seiring waktu, bentuk repertoar ini menjadi lebih terorganisir. Dapat dilihat ketika revolusi Prancis, aktivis mulai menggunakan pamflet untuk menyebarkan ide-ide revolusioner. Kemudian berkembang di abad ke-20, repertoar aksi berkembang dengan memanfaatkan perkembangan teknologi (Tilly, 2004).

Ciri khas dari gerakan sosial yang dikemukakan oleh Tilly adalah cara gerakan menampilkan diri di publik dengan menunjukkan *worthiness* (kepatutan), *unity* (kesatuan), *numbers* (jumlah), dan *commitment* (komitmen). Elemen ini berperan penting dalam melegitimasi suatu tindakan kolektif sekaligus menarik dukungan dari

pihak luar. Perkembangan dari elemen ini disoroti melalui perubahan media aksi, demonstrasi buruh di Inggris pada abad ke-19 menampilkan spanduk dan simbol-simbol tertentu. Tetapi di era modern, aksi sering kali ditampilkan melalui media sosial dan internet (Tilly, 2004).

Tilly menyoroti perbedaan antara gerakan sosial pramodern dan modern dalam karyanya. Tilly berpendapat bahwa gerakan sosial pramodern bersifat parokial karena kepentingannya terkonsentrasi pada satu komunitas dan tersegmentasi kepada orang-orang yang melakukan tindakan langsung. Sedangkan gerakan sosial modern melibatkan interaksi yang berkelanjutan antara pemegang kekuasaan dan orang-orang yang berhasil klaim tanpa memiliki representasi formal. Orang-orang tersebut membuat tuntutan yang terlihat di depan publik untuk perubahan dalam distribusi atau penggunaan kekuasaan (Ebbinghaus dalam Tilly, 2024).

Gagasan Tilly bahwa elemen-elemen gerakan sosial memiliki sifat modular, yaitu dapat diadaptasi dan digunakan dalam konteks yang berbeda. Repertoar aksi tidak hanya sekedar alat ekspresi tetapi menjadi mekanisme dalam memengaruhi struktur kekuasaan. Repertoar ini dapat berupa komitmen seperti petisi. Klaim kolektif digunakan sebagai pendesak perubahan, di mana Tilly membagi jenis klaim menjadi tiga, yaitu *program claims*, *identity claims*, dan *standing claims*. Elemen WUNC merupakan metode gerakan aksi untuk meningkatkan legitimasi mereka. Elemen ini dapat memengaruhi opini publik yang dapat memperluas dukungan gerakan (Tilly, 2004).

3. Gerakan Sosial Baru

Gerakan sosial baru merupakan transformasi teori gerakan sosial sebelumnya. Dalam "*The Theory of Communicative Action*", Jürgen Habermas mengkritik gerakan sosial tradisional yang berfokus pada perjuangan kelas. Menurut Habermas. Gerakan

sosial baru menekankan kemunculannya sebagai respons terhadap kompleksitas masyarakat modern dan tantangan yang ditimbulkan oleh sistem kapitalis (Habermas, 1981). Habermas menyatakan bahwa gerakan-gerakan baru tidak berkaitan dengan isu-isu distribusi tradisional, tetapi lebih berfokus pada "tata bahasa bentuk-bentuk kehidupan," yang mencakup masalah-masalah terkait budaya, ekologi, dan identitas (Habermas, 1981).

Jürgen Habermas mengembangkan teori gerakan sosial baru melalui pemeriksaan kritis terhadap teori gerakan sosial tradisional dan mengusulkan kerangka konsep yang lebih komprehensif. Habermas mengkritik dimensi teori sebelumnya yang menekankan pada dimensi politik dan ekonomi, yang seringkali mengabaikan identitas dan budaya gerakan sosial. Habermas beranggapan bahwa gerakan kontemporer tidak hanya didorong oleh kepentingan material melainkan nilai budaya dan pencarian identitas juga terlibat di dalamnya (Habermas, 1981).

Tidak seperti teori gerakan sosial tradisional yang hanya berfokus pada perebutan kekuasaan, gerakan sosial kontemporer lebih berfokus pada pembangunan konsensus, dialog, dan penguatan identitas (Habermas, 1981). Habermas mengkaji empat jenis gerakan sosial yang berpengaruh, yaitu gerakan yang bertujuan (teologis), gerakan yang menampilkan diri (dramaturgis), gerakan yang diatur norma (normatif), dan gerakan yang berfokus pada komunikasi (komunikatif). Dari keempat kajian tersebut, Habermas menilai hanya gerakan yang berfokus pada komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai instrumen dalam mengartikulasikan pemahaman bersama terhadap suatu kondisi tertentu (Habermas, 1981).

Habermas mengaitkan tindakan komunikatif dengan konsep dunia kehidupan, dimana komunikasi merupakan instrumen penjaga hubungan sosial (Habermas, 1981). Habermas mengkritik praktik komunikasi yang terjadi di abad ke-18 hingga ke-19

dimana kaum borjuis menjembatani ranah privat dan publik dalam kehidupan sosial di masyarakat. Sehingga ruang publik pada masa itu sangat dibatasi dengan praktik politik borjuis. Habermas memandang tindakan komunikatif dan ruang publik merupakan inti dari gerakan sosial (Habermas, 1981). Kedua hal tersebut mengalami perubahan yang sangat besar di era kontemporer ini, dimana masyarakat modern menjadi lebih demokratis.

Habermas mendefinisikan ruang publik sebagai wadah bagi individu untuk berkumpul dan membahas isu-isu yang menjadi kepentingan bersama, terlepas dari kendali suatu organ. Ruang publik disini merujuk pada dialog terbuka dan perdebatan kritis yang terbuka bagi semua orang. Habermas berpendapat bahwa ruang publik sangat penting bagi demoratisasi. Ruang publik yang dinamis memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam diskusi kritis yang menghasilkan pemikiran kolektif untuk membentuk opini publik untuk meminta pertanggungjawaban kekuasaan (Habermas, 1981).

Lebih lanjut, ruang publik berkaitan dengan tindakan komunikatif. Habermas mengemukakan bahwa tindakan komunikatif mengacu pada interaksi antar individu dalam mencari konsensus bersama melalui dialog. Berbeda dengan tindakan strategis yang berorientasi pada hasil dan terkadang manipulatif, tindakan komunikatif berorientasi pada pertukaran pikiran dan pencarian nilai bersama. Tindakan komunikatif merupakan hal fundamental untuk berfungsinya ruang publik. Habermas berpendapat bahwa tindakan komunikatif memungkinkan partisipan untuk mengartikulasikan kepentingan mereka untuk mencapai kesepakatan bersama (Habermas, 1981).

Gagasan Habermas tentang ruang publik dan tindakan komunikatif dapat diterapkan dalam memahami peran ekspresi simbolik dalam teorinya. Habermas

menekankan simbol dan bahasa dalam memfasilitasi pemahaman dan komunikasi di antara individu. Simbol dan bahasa dapat mendorong pengakuan intersubjektif, karena memungkinkan individu untuk mengidentifikasi diri mereka dengan suatu gerakan. Pengakuan ini membangun solidaritas dan tindakan kolektif yang merupakan komponen esensial dalam gerakan sosial (Habermas, 1981).

Kedua konsep yang dikemukakan oleh Habermas yaitu ruang publik dan tindakan komunikatif akan digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis bagaimana Gerakan BDS dapat mempengaruhi dimensi naratif komunitas global terhadap konflik Israel-Palestina. Kedua konsep tersebut memberikan perspektif bagaimana gerakan BDS memanfaatkan diskusi, dialog, dan tekanan publik untuk mentransformasikan nilai-nilai budaya dan sosial secara transnasional. Gerakan BDS dapat dipahami melalui upayanya memanfaatkan ruang diskusi global sebagai wadah dan memanfaatkan tindakan kolektif sebagai alat untuk mendistribusikan narasi.

1.5 Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Dalam menganalisis dampak Gerakan *Boycott, Divestment & Sanction*, peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan serta menganalisis fenomena yang terkait dengan konflik Israel-Palestina secara objektif, dengan fokus pada menghasilkan kesimpulan yang berkaitan dengan dampak Gerakan BDS terhadap Israel. Hasil penelitian akan menggali data yang diperoleh dengan memanfaatkan konsep dan alat analisis yang sesuai untuk merumuskan kesimpulan mengenai implikasi Gerakan *Boycott, Divestment & Sanction* dan dampaknya dalam konflik Israel-Palestina

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik telaah Pustaka (*library research*), yaitu mengumpulkan data dari literatur yang relevan dan kemudian menganalisisnya. Buku, jurnal, situs web, laman berita, laporan, dokumen, dan artikel *online* adalah semua jenis literatur yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, sehingga penjelasan terkait masalah yang diteliti bergantung pada validitas data yang didapat oleh penulis.

Data sekunder yang dikumpulkan penulis melalui pengumpulan temuan dari sumber informasi relevan seperti buku-buku yang membahas Gerakan BDS, jurnal ilmiah mengenai sejarah Gerakan BDS, laman berita yang membahas bagaimana dampak gerakan terhadap Israel, laman web dari Gerakan BDS, dokumen terkait seperti laporan konflik Israel-Palestina, serta laman web internet yang kredibel. Penelitian ini juga akan mencoba menggali informasi terkait penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan skema untuk kemudian digunakan sebagai input. baik dari segi konsep, konteks, dan analisis.

C. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

D. Metode Penulisan

Metode deduktif adalah teknik penalaran yang digunakan secara sistematis untuk mencapai kesimpulan yang tepat. Metode ini dimulai dengan pikiran utama dan memberikan perspektif mulai dari yang umum dan spesifik luar ke perspektif khusus

(umum-khusus). Pertanyaan umum (atau hipotesis) dapat disajikan dan diuji kemungkinan mencapai kesimpulan khusus yang dapat diterima (Fadli 2021).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis akan melakukan tinjauan pustaka terkait dengan konsep yang digunakan dalam penelitian, yaitu *transnational advocacy network* dan gerakan sosial baru. Secara lebih spesifik, penulis akan menjelaskan keterkaitan antara konsep-konsep tersebut dengan studi Ilmu Hubungan Internasional serta menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan isu-isu yang dibahas dalam penelitian ini. Berikut penjelasannya:

3.1 Transnational Advocacy Network (TAN)

Transnational Advocacy Network (TAN) merupakan sebuah konsep yang menggambarkan jaringan global, mulai dari individu, kelompok masyarakat sipil, hingga organisasi non-pemerintah (NGO) yang bekerja lintas batas dalam memperjuangkan isu-isu tertentu seperti lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender. Keck dan Sikkink memperkenalkan konsep *Transnational Advocacy Network* dalam bukunya yang berjudul "*Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*" pada tahun 1998. Menurut Keck dan Sikkink, TAN merupakan jaringan aktor yang terhubung secara informal yang terorganisir untuk mencapai tujuan bersama dan didasari oleh nilai-nilai normatif tertentu (Keck dan Sikkink, 1998).

Kerangka TAN yang dikemukakan oleh Keck dan Sikkink mengacu pada tradisi sosiologis yang berfokus pada interaksi kompleks antar aktor, konstruksi makna yang intersubjektif, dan negosiasi serta kelenturan identitas dan kepentingan. Teori TAN menjadi perhatian para konstruktivis dalam teori hubungan internasional dan para ahli teori gerakan sosial dalam politik komparatif. Keck dan Sikkink

menjadikan kedua tradisi tersebut sebagai dasar analisis TAN. Menurut Keck dan Sikkink, jaringan beroperasi secara simultan dalam arena politik domestik dan internasional, memanfaatkan berbagai sumber daya, menganggap mereka adalah bagian dari masyarakat internasional (Keck dan Sikkink, 1998).

Kaum konstruktivis dan kaum rasionalis beranggapan bahwa sumber daya digunakan secara strategis untuk memengaruhi sistem negara global dan organisasi internasional yang dibentuk oleh para aktor negara. Dimensi ganda ini menyoroti interaksi antara agensi strategis dan realitas politik yang dibangun secara sosial. Perspektif rasionalis akan mengenali bahasa insentif dan kendala, strategi, lembaga, dan aturan, sementara konstruktivis akan lebih nyaman dengan norma, hubungan sosial, dan pemahaman intersubjektif (Keck dan Sikkink, 1998).

TAN mencakup jaringan rumit yang menghubungkan antara organisasi yang beroperasi secara transnasional untuk memperjuangkan nilai, norma, atau kebijakan tertentu. Kerangka kerja ini menggarisbawahi peran penting TAN dalam memperkuat pesan advokasi, memperluas jangkauan organisasi, dan menyediakan sumber daya tambahan. Tambahan ini yang kemudian meningkatkan keberhasilan paya advokasi secara keseluruhan, yang berkontribusi pada keberhasilan yang dirasakan (Keck dan Sikkink, 1998).

TAN merupakan hal yang baru dalam studi ilmu hubungan internasional. TAN memberikan wadah bagi aktor internasional non-tradisional untuk memobilisasi informasi secara strategis guna menciptakan isu dan wacana baru, serta membujuk, memberi tekanan, dan memperoleh pengaruh atas organisasi dan pemerintah yang jauh lebih kuat. Aktivis dalam jaringan ini tidak hanya mencoba memengaruhi hasil kebijakan, tetapi juga mengubah ketentuan dan sifat dalam perdebatan. Mereka tidak

selalu berhasil dalam upaya mereka, tetapi mereka menjadi pemain penting dalam perdebatan kebijakan di tingkat regional dan internasional (Keck dan Sikkink, 1998).

Jaringan dalam TAN merupakan aktor yang berprinsip dan strategis, mereka 'membangkai' isu-isu agar mudah dipahami oleh audiens target, menarik perhatian dan mendorong tindakan, serta mengalokasikannya ke tempat-tempat kelembagaan yang menguntungkan. Dengan 'membangkai', upaya strategis yang disadari oleh sekelompok orang membentuk pemahaman bersama tentang dunia dan diri mereka sendiri untuk melegitimasi dan memotivasi tindakan kolektif (McAdam, 1996). Aktor jaringan membawa ide, norma, dan wacana baru ke dalam perdebatan kebijakan yang berfungsi sebagai sumber informasi. Norma-norma tersebut menggambarkan harapan kolektif untuk perilaku yang tepat dari para aktor dengan identitas tertentu (Katzenstein, 1996).

Jaringan-jaringan ini memfasilitasi penerapan norma dengan menekan target audiens untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan baru dan memantau komitmen mereka terhadap standar-standar yang ditetapkan. Dengan demikian mereka berkontribusi dalam mengubah persepsi negara dan lembaga mengenai identitas, kepentingan, dan preferensi mereka, yang kemudian mengubah posisi diskursif mereka dan memengaruhi prosedur dan kebijakan. Seperti yang dikatakan Finnemore, Keck dan Sikkink setuju dengan narasi bahwa negara tertanam dalam jaringan hubungan sosial transnasional dan internasional yang padat (Keck dan Sikkink, 1998).

Jaringan merupakan struktur komunikatif. Dalam memengaruhi wacana, prosedur, dan kebijakan, jaringan dapat menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar yang mengelompokkan para aktor dari berbagai posisi kelembagaan dan nilai. TAN juga dapat dipahami sebagai ruang politik, di mana para aktor dalam situasi yang berbeda menegosiasikan secara formal dan informal – makna sosial, budaya, dan

politik dari usaha bersama mereka. Dengan demikian, jaringan transnasional berfungsi sebagai kendaraan utama untuk negosiasi budaya dan sosial, yang merupakan hal mendasar dalam proses integrasi regional (Keck dan Sikkink, 1998).

Banyak akademisi mengakui bahwa negara tidak lagi memiliki monopoli atas urusan publik, yang mengarah pada munculnya istilah-istilah seperti hubungan transnasional, masyarakat sipil global, dan masyarakat sipil internasional untuk menggambarkan lingkup interaksi internasional yang terus berkembang. Dari perspektif ini, negara tidak lagi hadir sebagai entitas kesatuan; sebaliknya, interaksi yang semakin padat dan rumit antara individu, kelompok, aktor negara, serta lembaga regional dan internasional melampaui sekadar mewakili kepentingan di panggung global (Keck dan Sikkink, 1998).

Karya empiris sosiologi terkini telah menyoroti perubahan signifikan perubahan 'di atas' dan 'di bawah' negara. Teori pemerintah dunia yang dikemukakan oleh para teoretis seperti John Meyer, John Boli, dan George Thomas menawarkan perspektif baru tentang masyarakat internasional. Menurut teori ini, lingkup internasional merupakan tempat penyebaran budaya dunia, yang membentuk karakteristik negara itu sendiri (Thomas, 2009). Penyebaran ini terjadi melalui organisasi antar pemerintah dan non pemerintah, tetapi baik sumber norma maupun proses yang melaluinya norma budaya global berkembang tidak ditentukan secara memadai (Finnemore, 1996).

Dalam memahami perubahan dalam sistem politik global, penting untuk membedakan kategori aktor transnasional dan logika uniknya. Keck dan Sikkink berpendapat bahwa aktor transnasional memiliki tujuan dan sasaran yang beragam, yang memerlukan analisis mendalam tentang peran mereka. Jaringan transnasional berfungsi sebagai arena negosiasi budaya dan politik, bukan sekadar memberlakukan

norma-norma Barat yang dominan. Meskipun norma-norma Barat telah menjadi kerangka yang menentukan bagi banyak jaringan, tetapi bagaimana norma-norma ini diartikulasikan berubah dalam proses aktivitas jaringan (Keck dan Sikkink, 1998).

Dengan kata lain, seperti yang disadari oleh antropolog modern, budaya bukanlah pengaruh yang mengglobal, tetapi bersifat dinamis. Wacana tertentu seperti hak asasi manusia menyediakan bahasa untuk dinegosiasikan. Dalam bahasa ini, hak asasi manusia adalah wacana yang sangat mendisiplinkan, namun, wacana tersebut merupakan wacana permisif yang memungkinkan berbagai kelompok untuk menegosiasi ulang maknanya. Hal ini bisa dilihat dari keberhasilan hak-hak perempuan yang diartikulasikan sebagai hak asasi manusia. Oleh karenanya, Keck dan Sikkink percaya bahwa jaringan sangat berharga dalam melacak munculnya norma-norma bersama yang mendukung integrasi regional dan internasional (Keck dan Sikkink, 1998).

TAN dengan demikian dapat memberikan penjelasan tentang perubahan transnasional, sebuah model yang bukan sekedar model 'penyebaran' lembaga dan praktik liberal, tetapi model yang melalui preferensi dan identitas para aktor yang terlibat dalam masyarakat transnasional. Dikarekanak jaringan bersifat sukarela dan horizontal, para aktor berpartisipasi di dalamnya sejauh mereka merasakan pembelajaran dan rasa hormat bersama. Jaringan modern bukanlah jalur penghubung cita-cita liberal, tetapi kendaraan untuk pertukaran komunikasi dan politik, dengan potensi untuk saling mengubah para partisipan (Keck dan Sikkink, 1998).

Keck dan Sikkink menjelaskan bahwa hubungan dalam jaringan aktivis transnasional serupa dengan hubungan dalam gerakan sosial di lingkup lokal. Keduanya memiliki beberapa kesamaan penting, seperti berfokus pada nilai-nilai prinsipil, pemanfaatan informasi secara akurat, pembangunan keyakinan untuk

membawa perubahan, hingga strategi politik untuk mencapai tujuan (Keck dan Sikkink, 1998). Mereka menciptakan perspektif atau kerangka kerja yang bertujuan untuk memanfaatkan informasi tersebut kemudian dikemas menjadi sebuah strategi. Namun terkadang terjadi perbedaan cara memandang atau pembedaan isu yang kurang tepat sehingga dapat memicu konflik internal yang dapat membawa perubahan signifikan dalam jaringan tersebut (Keck dan Sikkink, 1998).

Kemunculan TAN didasari oleh kekhawatiran masyarakat seperti ketidakadilan dan penindasan. Ketika mereka tidak memiliki akses dalam arena politik atau peradilan domestik, mereka cenderung untuk mencari koneksi internasional untuk mengekspresikan kekhawatiran mereka (Keck dan Sikkink, 1998). Aktivis Jaringan biasanya terbentuk pada klaim tertentu, sering kali satu jaringan akan memicu terbentuknya jaringan lain. Selain itu, kesempatan untuk membuat jaringan lebih besar didukung oleh pertumbuhan organisasi dan konferensi internasional yang mempermudah jaringan-jaringan tersebut untuk memperjuangkan isu-isu yang mereka kawal (Keck dan Sikkink, 1998).

Jaringan transnasional mencari pengaruh dengan berbagai cara, sama seperti yang dilakukan dengan kelompok politik ataupun gerakan sosial lainnya, tetapi mereka tidak memiliki kekuasaan dalam pengertian tradisional, mereka harus menggunakan kekuatan informasi untuk mengubah konteks nilai di mana negara membuat kebijakan. (Keck dan Sikkink, 1998). Meskipun cara yang dilakukan jaringan dianggap sebagai upaya persuasif, Keck dan Sikkink mengembangkan tipologi untuk menjelaskan jenis taktik yang digunakan jaringan ini, antara lain: 1) *Information Politics*, 2) *Symbolic Politics*, 3) *Leverage Politics*, dan 4) *Accountability Politics*.

Information politics, mengacu pada kemampuan dalam menghasilkan informasi yang kredibel dan relevan secara politik dan mendistribusikannya di tempat yang akan memberikan dampak terbesar. *Symbolic politics*, melibatkan penggunaan simbol, cerita, atau tindakan yang beresonansi dengan audiens yang jauh. *Leverage politics*, adalah kemampuan untuk melibatkan aktor-aktor yang kuat untuk campur tangan dalam situasi di mana anggota jaringan yang lemah tidak memiliki pengaruh. *Accountability politics*, berfokus pada upaya untuk memastikan aktor-aktor yang kuat mematuhi komitmen atau prinsip yang telah mereka nyatakan sebelumnya, memastikan mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka. Strategi ini memungkinkan jaringan advokasi transnasional untuk mengubah arah hasil kebijakan meskipun mereka tidak memiliki kekuatan tradisional (Keck dan Sikkink, 1998).

3.2 Gerakan Sosial

Gerakan sosial merupakan bentuk kolektif yang dilakukan oleh individu dan kelompok masyarakat untuk menuntut perubahan atau kepentingan tertentu. Akar dari gerakan sosial oleh Tilly merujuk pada pertentangan struktur sosial, politik, atau ekonomi. Kemunculan gerakan sosial tidak terlepas dari adanya ketidakpuasan material atau ketidakadilan ekonomi di masyarakat. Material ini yang juga digunakan gerakan sosial untuk keberlanjutan dan kesuksesan aksi kolektif (Ebbinghaus dalam Tilly, 2024).

Tilly mengemukakan bahwa gerakan sosial muncul bersamaan dengan tiga transformasi struktural bersamaan selama abad ke-18 dan ke-19 yaitu, demokratisasi, nasionalisasi dan perkembangan kapitalisme modern. Tilly berpendapat bahwa gerakan sosial merupakan hasil dari peningkatan demokrasi yang signifikan, peningkatan penetrasi negara nasional ke dalam kehidupan lokal, dan kebangkitan

kapitalisme yang melibatkan “akumulasi dan konsentrasi modal, proletarisasi populasi pekerja, dan meningkatnya peran pedagang dan produsen dalam urusan nasional” (Ebbinghaus dalam Tilly, 2024).

Gerakan sosial merupakan suatu yang terorganisir, berkelanjutan, menolak *self-conscious*, dan kesamaan identitas. Gerakan sosial tidak terjadi secara spontan, melainkan ada pengaturan dari individu dan kelompok. Dalam aktivitasnya, gerakan sosial tidak terjadi satu kali, tetapi berlangsung dalam jangka waktu tertentu. *Self-conscious* merujuk pada kesadaran dari individu dan kelompok bahwa mereka sedang berada dalam pertentangan politik. Kesadaran ini yang kemudian membentuk identitas bersama mulai dari latar belakang, tujuan, dan nilai-nilai yang sama (Rachmadian dalam Tilly, 2019).

Konsep utama dalam gerakan sosial yang dikemukakan oleh Tilly adalah repertoar, yaitu serangkaian perlawanan kolektif. Repertoar ini mengacu pada strategi, taktik, dan bentuk protes yang digunakan dalam aksi. Repertoar ini bersifat dinamis, dapat berkembang seiring waktu (Tilly, 2004). Tilly menekankan keberlanjutan gerakan sosial melalui mobilisasi sumber daya, representasi publik melalui WUNC (*Worthiness, Unity, Numbers and Commitment*), dan kesempatan politik yang memberikan kesempatan gerakan untuk berinteraksi dengan struktur kekuasaan (Ebbinghaus dalam Tilly, 2024).

Repertoar yang dikembangkan oleh Tilly merupakan konsep kerja yang menyoroti berbagai aktivitas perlawanan sebagai cara untuk menyampaikan tuntutan oleh kelompok yang ter subordinasi. Eksistensi repertoar dapat berada pada level kelompok kecil dan umum. Di mana kelompok kecil ini menyampaikan klaim sebagai alat perlawanan. Dalam kelompok umum, repertoar ini berperan sebagai alat tuntutan

yang bersifat umum. Hal ini yang mendorong banyak orang untuk menyampaikan tuntutan mereka tanpa dibatasi ruang dan waktu (Rachmadian dalam Tilly, 2019).

Tilly menjelaskan bahwa kondisi struktural memengaruhi perkembangan dari suatu gerakan sosial. Perubahan kondisi struktural dapat melahirkan keluhan yang sama, tetapi menciptakan pola perilaku yang bisa dijadikan sebagai perbandingan. Perubahan struktural ini yang mendorong suatu gerakan sosial untuk beradaptasi dalam menemukan strategi dan taktik yang efektif. Akibat dari perubahan ini menjadi akar gerakan dalam menganalisis penyebab dan dampak tersebut (Ebbinghaus dalam Tilly, 2024).

Keberlanjutan gerakan sosial juga tidak terlepas dari mobilisasi sumber daya yang dikembangkan oleh Tilly. Sumber daya ini meliputi finansial, pengetahuan, jaringan, organisasi, media, dan aktivis. Keberhasilan gerakan sosial bergantung pada kemampuan para aktornya untuk merencanakan, membangun koalisi, dan persamaan pemahaman. Di mana kemampuan ini diperlukan untuk mengadopsi strategi aksi di berbagai lokasi dan waktu. Jaringan dan media diperlukan untuk mempromosikan isu-isu yang dikawal oleh gerakan sosial (Tilly, 2004).

Representasi publik melalui WUNC (*Worthiness, Unity, Numbers and Commitment*) yang dikemukakan oleh Tilly menjadi elemen penting untuk menunjukkan kekuatan mereka. *Worthiness* menyoroti kedudukan etis dari partisipannya dan menyampaikan kebenaran. *Unity* ini menekankan solidaritas dan kekompakan individu yang terlibat di dalam gerakan. *Numbers* mengacu pada luas dan ukuran basis dukungan gerakan. Dan *Commitment* menunjukkan dedikasi partisipan dalam mempertahankan upaya mereka dari waktu ke waktu meskipun mendapatkan banyak tantangan dari eksternal (Ebbinghaus dalam Tilly, 2024).

Keberhasilan gerakan sosial yang dikemukakan oleh Tilly dapat dilihat dari kombinasi tiga elemen utama, yaitu repertoar, mobilisasi sumber daya, dan representasi publik WUNC. Ketiga elemen ini saling terhubung dan terkoordinasi untuk menunjukkan keefektifan gerakan. Kombinasi elemen ini dapat mengukur pertahanan gerakan selama periode tertentu dan penyesuaian terhadap kondisi struktural yang berubah. Efektivitas gerakan dalam mempertahankan elemen ini biasanya menghasilkan dampak politik yang nyata, seperti perubahan kebijakan dari suatu aktor (Tilly, 2004).

2.3 Gerakan Sosial Baru

Gerakan sosial baru merupakan pergerseran dalam pemahaman gerakan sosial yang muncul sebelumnya. Teori gerakan sosial baru muncul sejak tahun 1960-an sebagai transformasi teori sebelumnya yang berfokus pada perjuangan kelas. Teori gerakan sosial baru berfokus pada gerakan yang memprioritaskan isu-isu budaya dan sosial seperti identitas, hak asasi manusia, dan kualitas hidup. Habermas menekankan peran komunikasi dan dunia kehidupan dalam gerakan-gerakan sosial. Habermas berpendapat bahwa gerakan sosial baru muncul dari pergerseran konflik masyarakat menjadi konflik yang melibatkan nilai-nilai dan norma-norma dunia kehidupan (Habermas, 1981).

Habermas mengemukakan bahwa akar gerakan sosial baru dapat dipahami sebagai respons defensif terhadap persimpangan sistem dan dunia kehidupan (Habermas 1981). Sistem ini merujuk pada negara dan mekanisme ekonomi yang berkembang melalui modernisasi kapitalis sedangkan dunia kehidupan merujuk pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Habermas menggambarkan fenomena ini sebagai

“kolonisasi dunia kehidupan”. Kolonisasi ini terjadi ketika sistem mengganggu dan mengikis fondasi komunikatif dunia kehidupan (Habermas, 1981).

Gangguan ini terjadi karena intervensi ekonomi dan politik memaksakan rasionalitas "instrumental" atau strategis ke dunia kehidupan, membentuk tindakan melalui mekanisme uang (pasar) dan kekuasaan (birokrasi negara) daripada melalui interaksi komunikatif yang ditujukan untuk saling pengertian dan konsensus. Dunia kehidupan bergantung pada rasionalitas komunikatif untuk reproduksi sosial, interaksi simbolik, sosialisasi, dan pembentukan identitas. Selanjutnya, gerakan sosial baru terbentuk sebagai respons terhadap penjajahan dan bersatu dalam kritik terhadap sistem yang berkembang (Edward dalam Habermas, 2009).

Habermas memandang terdapat perbedaan dalam masyarakat kapitalis modern, sistem yang terdiri dari ekonomi dan negara, dan dunia kehidupan dengan ranah publik dan privatnya. Ekonomi menghasilkan 'uang', negara menghasilkan 'kekuasaan', ranah publik menghasilkan 'pengaruh', dan ranah privat menghasilkan 'komitmen'. Produk atau media ini saling terhubung yang kemudian 'diperdagangkan'. Ekonomi membutuhkan bantuan dari negara 'kontrak dan aturan, publik memengaruhi 'pola konsumsi', dan privat menyediakan 'tenaga kerja yang berkomitmen. Kedua sistem ini perlu keseimbangan agar tidak terjadi kolonisasi dunia kehidupan (Scrambler & Kelleher, 2006).

Dalam gerakan sosial baru, buruh tidak lagi menjadi sumber perubahan yang radikal karena telah terintegrasi ke dalam sistem politik melalui partai buruh dan serikat pekerja. Menurut Habermas, para agen dalam gerakan sekarang penting dalam menghasilkan ruang publik untuk perdebatan bukanlah mereka yang bertanya tentang apa yang seharusnya kita dapatkan, tetapi mereka yang bertanya tentang siapa kita, bagaimana kita hidup, dan siapa yang bertanggung jawab. Mereka adalah kaum

feminis, mahasiswa nonkonformis, kaum pecinta lingkungan, dan orang-orang yang menjalani gaya hidup alternatif (Edwards dalam Habermas, 2004).

Habermas melakukan kritik terhadap rasionalitas yang terbentuk, khususnya yang berkaitan dengan modernitas, teori sosial, dan fungsi masyarakat demokratis. Habermas mengkritik bentuk rasionalitas yang dominan dalam modernitas, yang disebut sebagai rasionalitas instrumental atau “Zweckrationalität”. Rasionalitas ini berfokus pada efisiensi, kalkulasi antara tujuan dan cara, dan penguasaan dunia demi kepentingan manusia. Habermas berpendapat bahwa rasionalitas yang sempit ini mengabaikan dimensi normatif manusia seperti pertimbangan etika, nilai, dan hubungan sosial (Habermas, 1981).

Habermas memperkenalkan konsep rasionalitas komunikatif. Bentuk rasionalitas ini menekankan peran dialog, komunikasi, dan saling pengertian dalam interaksi manusia. Habermas berpendapat bahwa rasionalitas tidak boleh dibatasi pada kalkulasi atau penalaran teknis, tetapi juga harus mencakup kemampuan untuk terlibat dalam wacana yang memiliki makna, di mana individu dapat berdialog dan bernegosiasi untuk mencapai konsensus didasari alasan bersama (Habermas, 1981). Melalui rasionalitas komunikatif, individu dapat menentang struktur kekuasaan yang ada. Perspektif ini menyoroti kemungkinan bentuk rasionalitas yang partisipatif dan lebih inklusif (Habermas, 1981).

Rasionalitas komunikatif pada dasarnya bersifat normatif, di mana pedoman komunikasi didasari pada nilai dan prinsip bersama. Individu dalam rasionalitas komunikatif diharapkan mematuhi norma-norma yang terbentuk seperti kejujuran dan menghargai perspektif individu lain. Dalam hal ini, norma-norma tersebut akan memastikan bagaimana rasionalitas komunikatif memainkan peran penting dalam interaksi sosial. Implikasi rasionalitas komunikatif ini memungkinkan terjadinya

perdebatan rasional-kritis terhadap masalah tertentu. Sehingga proses ini penting untuk membentuk opini publik dan pengambilan keputusan yang demokratis (Habermas, 1981).

Rasionalitas komunikatif menjadi konsep fundamental untuk menjelaskan tindakan komunikatif dan ruang publik. Tindakan komunikatif berakar pada peran individu dalam melakukan komunikasi. Habermas berpendapat bahwa bahasa dan kapasitas individu menjadi dasar dalam berkomunikasi untuk mengartikulasikan pikiran dan perasaan. Bahasa tidak hanya sebagai alat, melainkan sebagai media utama dalam proses komunikasi. Individu dapat mengartikulasikan pikiran dan tujuan mereka dengan jelas, yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam diskusi yang mendalam dan mengarah pada pemahaman atas perspektif antar individu (Habermas, 1981).

Habermas menghubungkan tindakan komunikatif dengan ruang publik sebagai kerangka fundamental dalam rasionalitas komunikatif. Ruang publik menjadi konteks terjadinya tindakan komunikatif, di mana individu melakukan dialog terbuka, perdebatan kritis dan pertukaran persepsi terhadap masalah yang menjadi kepentingan bersama. Secara tidak langsung ruang publik mempunyai peran yang sangat penting dalam proses demokrasi. Habermas mengemukakan elemen utama dalam konsep ruang publik, antara lain: 1) inklusivitas, 2) kebebasan berekspresi, dan 3) saluran komunikasi (Edwards dalam Habermas, 2004).

Ruang publik harus terbuka dan dapat diakses oleh semua individu, terlepas dari latar belakang ekonomi, sosial, atau budaya. Inklusivitas dalam ruang publik memastikan berbagai sudut pandang dari partisipan dapat terwakili dalam diskursus publik. Lebih lanjut, inklusivitas membantu menyeimbangkan persaingan, kelompok marginal dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan diskursus publik.

Hal ini mendorong terbangunnya hubungan dan rasa saling pengertian antar partisipan. Sehingga membantu menjembatani kesenjangan dan ketegangan sosial (Habermas, 1981).

Ruang publik memerlukan saluran komunikasi untuk memobilisasi informasi, ide, dan pemahaman individu atau kelompok. Saluran komunikasi berperan penting dalam menjangkau khalayak luas dan memungkinkan partisipasi yang lebih luas dalam wacana publik. Saluran komunikasi mengalami perubahan yang signifikan dalam interaksinya, di mana sebelumnya interaksi dilakukan di kedai kopi, taman, ataupun salon, kini berkembang menjadi interaksi di *platform* digital. Hal ini memfasilitasi pertukaran sudut pandang yang beragam dan menginisiasi interaksi secara global (Sari & Siahainenia dalam Habermas, 2015).

Gerakan sosial baru yang dikemukakan Habermas menawarkan kerangka kerja dalam memahami peran, strategi, dan aktor non-negara di arena global. Gerakan sosial memobilisasi individu untuk mengadvokasi kelompok yang terpinggirkan, mencapai tujuan bersama, dan memengaruhi diskusi kebijakan dengan membentuk wacana global. Gerakan sosial secara 'global' dapat dijelaskan sebagai 'pembawa bentuk-bentuk alternatif modernitas'. Jaringan transnasional menjadi alat mobilisasi bagi individu untuk mengoordinasikan tindakan dan memperkuat dampaknya terhadap isu-isu global (Edwards dalam Habermas, 2009).

Habermas menjelaskan perubahan melalui dua komponen, yaitu perubahan substantif dan simbolik. Kedua perubahan ini memainkan peran yang berbeda dalam cara masyarakat beradaptasi. Perubahan substantif menyoroti adanya pemulihan dunia kehidupan dari kolonialisasi sistem melalui perubahan kondisi material dan praktik kelembagaan. Sementara perubahan simbolis menyoroti pencapaian tujuan moral dan

etika melalui transformasi nilai dalam masyarakat. Kedua perubahan ini muncul melalui kombinasi tindakan komunikatif dan ruang publik (Habermas, 1981).

Di era kontemporer, gerakan sosial baru menjadi kerangka analisis untuk menjawab isu-isu kontemporer. Para ahli teori kritis media dan teknologi kontemporer juga telah menemukan penerapan konsep kolonisasi, interaksi komunikatif, dan ruang publik pada abad ke-21. Mereka memanfaatkan Habermas untuk mengeksplorasi potensi internet sebagai sumber kebangkitan ruang publik, menyediakan tempat di mana dialog dan debat yang bebas, terbuka, dan inklusif dapat berlangsung di antara warga negara, tanpa terhalang oleh campur tangan komersial (Downey & Fenton 2003).

Tabel 1. Perbandingan Gerakan Sosial dan Gerakan Sosial Baru

	Gerakan Sosial	Gerakan Sosial Baru
Historis	Modern awal (abad ke-18)	Pasca 1960-an
Konsep Utama	Repertoar, mobilisasi sumber daya, dan peluang politik	Ruang publik dan tindakan komunikatif
Tujuan	Perubahan struktural	Keseimbangan sistem dan dunia kehidupan
Pendekatan	Materalistis dan struktural	Rasionalitas komunikatif
Historis	Modern awal (abad ke-18)	Pasca 1960-an

Sumber: Penulis

2.3 Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, penulis merujuk pada beberapa literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada penulis mengenai dampak Gerakan *Boycott, Divestment, & Sanction* dalam konflik Israel-Palestina terhadap Israel dengan menggunakan konsep *transnational advocacy network* (TAN) dan gerakan sosial baru. Dari segi metodologi, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk

menganalisis dampak Gerakan *Boycott, Divestment, & Sanction* dalam konflik Israel-Palestina terhadap Israel. Berikut adalah beberapa literatur yang menjadi rujukan dalam proses penulisan ini, yang memberikan landasan teoritis dan pemahaman yang mendalam mengenai isu-isu terkait:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Fokus Penelitian
<i>Palestinian Women's Rights and Global Advocacy: A Comprehensive Examination of Boycott, Divestment, and Sanction Movement Strategies in 2010</i>	Heratri Anggrarini Sugianto	2010	Penelitian ini berfokus pada pengaruh Gerakan <i>Boycott, Diestment, & Sanction</i> dalam mengadvokasi permasalahan yang dihadapi perempuan Palestina. Penelitian ini mengeksplorasi pengaplikasian teori <i>transnational advocacy network</i> dalam menganalisis Gerakan <i>Boycott, Diestment, & Sanction</i> .
<i>Social Media Rhetoric of the Transnational Palestinian-led Boycott, Divestment, and Sanctions Movement</i>	Jennifer Hitchcock	2016	Penelitian ini berfokus pada pengaruh Gerakan <i>Boycott, Diestment, & Sanction</i> dalam menyebarkan kesadaran tentang konflik Israel-Palestina melalui sosial media. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana sosial media menjadi wadah Gerakan <i>Boycott, Diestment, & Sanction</i> untuk memobilisasi visi dan opini publik.
Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual pada Kasus Satinah	Dewi Kartika Sari & Royke R. Siahainenia	2015	Penelitian ini berfokus pada implementasi teori gerakan sosial baru terhadap kasus Satinah. Penelitian ini menjelaskan ruang publik virtual sebagai ruang berbagi untuk publik dalam aktivitas kolektif
Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International	Muhammad Arief Virgy, Yusa Djuyandi, dan Wawan Budi Darmawan	2020	Penelitian ini berfokus pada strategi <i>transnational advocacy network</i> yang dilakukan Greenpeace Indonesia untuk menekan deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar Internasional. Penelitian ini menganalisis strategi yang dikemukakan Keck dan Sikkink

			dan dikaitkan dengan strategi yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia.
--	--	--	---

Sumber: Penulis

Penelitian pertama adalah artikel berjudul “*Palestinian Women’s Rights and Global Advocacy: A Comprehensive Examination of Boycott, Divestment, and Sanction Movement Strategies in 2010*” yang ditulis oleh Heratri Anggrarini Sugianto yang diterbitkan pada tahun 2010. Penelitian ini berfokus pada pengaruh Gerakan *Boycott, Diestment, & Sanction* dalam mengadvokasi permasalahan yang dihadapi perempuan Palestina. Penelitian ini mengeksplorasi pengaplikasian teori *transnational advocacy network* dalam menganalisis Gerakan *Boycott, Diestment, & Sanction*. Penelitian ini mengakui pencapaian gerakan tersebut dalam memperkuat suara perempuan Palestina dan mendorong pemberdayaan masyarakat sipil global, yang dicapai melalui kemitraan strategis yang disengaja dan upaya kolaboratif.

Penelitian kedua adalah artikel berjudul “*Social Media Rhetoric of the Transnational Palestinian-led Boycott, Divestment, and Sanctions Movement*” yang ditulis oleh Jennifer Hitchcock yang diterbitkan pada tahun 2016. Penelitian ini berfokus pada pengaruh Gerakan *Boycott, Diestment, & Sanction* dalam menyebarkan kesadaran tentang konflik Israel-Palestina melalui sosial media. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana sosial media menjadi wadah Gerakan *Boycott, Diestment, & Sanction* untuk memobilisasi visi dan opini publik. Penelitian ini menggunakan analisis retorika untuk menentukan efektivitas dan karakteristik penggunaan media sosial oleh Gerakan *Boycott, Diestment, & Sanction* yang menargetkan Israel.

Penelitian ketiga adalah “Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual pada Kasus Satinah” yang ditulis oleh Dewi Kartika Sari dan Royke R. Siahainenia yang diterbitkan pada tahun 2015. Penelitian ini berfokus pada implementasi teori gerakan

sosial baru terhadap kasus Satinah. Penelitian ini menjelaskan ruang publik virtual sebagai ruang berbagi untuk publik dalam aktivitas kolektif. Penelitian ini mengeksplorasi ruang virtual telah menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk mempertahankan diri serta melakukan perlawanan yang digerakkan oleh aktor-aktor tertentu.

Penelitian keempat adalah “Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International” yang ditulis oleh Muhammad Arief Virgy, Yusa Djuyandi, dan Wawan Budi Darmawan yang diterbitkan pada tahun 2020. Penelitian ini berfokus pada strategi *transnational advocacy network* yang dilakukan Greenpeace Indonesia untuk menekan deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar Internasional. Penelitian ini menganalisis strategi yang dikemukakan Keck dan Sikkink dan dikaitkan dengan strategi yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia.